



RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2024

Dishubforlife@gmail.com

dishub@depok.go.id

Jl Perhubungan No 50 Jatimulya
Cilodong



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor transportasi merupakan urat nadi bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, terutama dalam kegiatan perekonomian. Suatu daerah mustahil dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik jika tidak didukung oleh transportasi yang baik. Depok merupakan sebuah kota yang memiliki posisi yang sangat strategis berada di poros Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Dari posisi ini menjadikan Depok sebagai kota yang menarik untuk berinvestasi dan bermukim yang menyebabkan dampak lain yang ditimbulkan yaitu masalah transportasi antara lain kemacetan lalu lintas.

Dinas Perhubungan Kota Depok memiliki peran strategis dalam bidang transportasi dan harus mampu meningkatkan kelancaran dan keselamatan transportasi dalam rangka menciptakan transportasi Kota Depok yang mengikuti kebutuhan masyarakat dan nyaman sebagai implementasi visi Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera. Transportasi tidak dapat dilihat secara parcial atau sektoral semata dalam perencanaan dan penanganannya. Sebagaimana transportasi yang menghubungkan satu sama lain, maka urusan transportasi atau perhubungan harus dilakukan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam urusan perencanaannya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (Satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan sangat berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok yang ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021 – 2026 yang berisikan Visi, Misi, Kebijakan, dan Program Kepala Daerah terpilih untuk lima tahun kedepan. RPJMD merupakan pedoman bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja) OPD. Rencana Kerja Dinas Perhubungan dalam proses penyusunannya mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Dinas Perhubungan Kota Depok. Selain itu juga dengan memperhatikan dan mempertimbangkan evaluasi renja Dinas Perhubungan tahun sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 ini, peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar pedoman yaitu :

1. Undang – undang nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang – undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang- undang No. 17 th 2007 tentang RPJPN tahun 2005 – 2025;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);



9. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Teknis Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2013 tentang SPM Bidang Perhubungan;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012-2032
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2020 tentang Retribusi Bidang Perhubungan
16. Peraturan Daerah Kota Depok No 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
18. Peraturan Walikota Depok Nomor 79 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2024 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2024 yaitu :

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Depok ke dalam rencana kerja yang akan ditempuh selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024.

- b. Sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Depok dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2024 adalah :

- a. Agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Depok dapat terarah dan berhasil dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
- b. Agar kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok selama kurun waktu tahun 2024 dapat diukur dan di evaluasi secara obyektif.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
- 2.3 Isu – Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
- 2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DISHUB

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP





BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022, Capaian Tahun 2023 s.d. Triwulan I dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2022 bertujuan untuk mengidentifikasi capaian Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi sehingga bisa dijadikan bahan masukan di penyusunan renja selanjutnya.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) program yaitu :

1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
3. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perhubungan

- Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2022 sebesar Rp. 105.968.275.940 dengan realisasi Rp. 97.151.645.281

Capaian
91,68%

Realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan

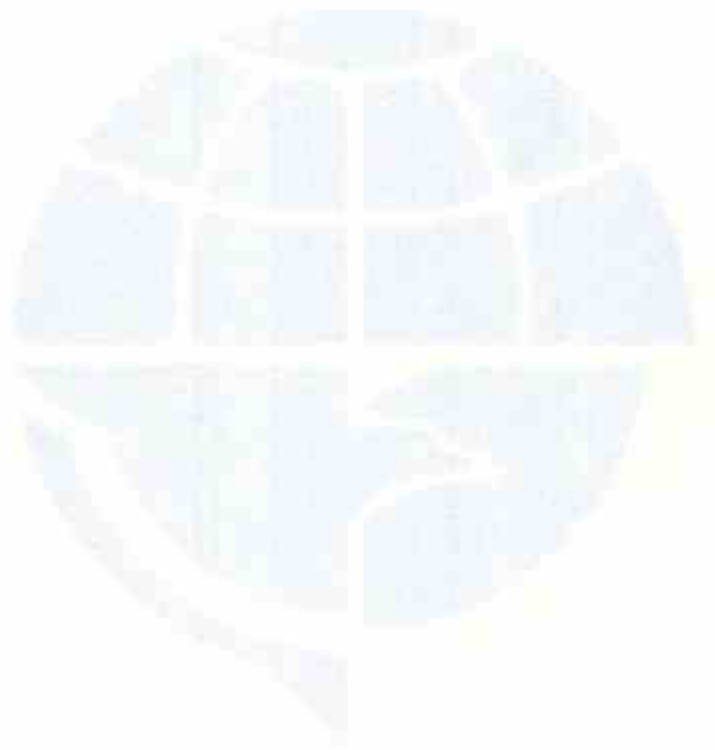
- Retribusi Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal dengan target Rp. 654.677.500, realisasi Rp 646.325.000 (98,72%)
- Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir dengan target Rp. 653.232.000, realisasi Rp.813.371.000 (124,51%)
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan target Rp 1.003.085.000, realisasi Rp. 1.099.580.392 (109,62%)

Capaian
110,95%



Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2023 terdiri atas 2 (dua) Program dengan 15 kegiatan dan 38 subkegiatan dengan alokasi anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar Rp 88.075.139.550 dengan realisasi pada tw 1 Rp 14.458.990.678 yang artinya capaian keuangan mencapai 16% dan fisik kinerja sebesar 21,42%.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2022 secara umum telah memenuhi harapan. Pelaksanaan dan capaian dari rencana kerja Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :





Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)

Kode	URUSAN (BIDANG) URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SUBSIDI/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN KEGIATAN SD TA 2023 (N-2)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN KEGIATAN SD TA 2023 (N-2)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN OFD TAHUN 2023 (N-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
			kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	PROGRAM/KEGIATAN/URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	143.769.36.000,00	100,00%	19.858.417.379,00	100,00%	22.161.395.701,00	100,00%	20.178.043.858,10	100,00%	22.371.144,000	25%	4.274,012.209	-			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	856.367.000,00	100%	88.619.500,00	100%	90.681.250,00	100%	81.519.350,10	100%	124.286,000	25%	81.238.280	-			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	85 dokumen	306.367.000,00	4 Dokumen	36.110.000,00	17 dokumen	5.360.750,00	17 dok	50.511,200	100%	42.438,000	4 Laporan	2.610.200	-			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	500.000,000	2 Dokumen	49.509.500,00	2 dokumen	4.320.500,00	2 dok	31.167,800	100%	81.848,000	2 dok	78.618.000	-			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan tepat waktu	100%	118.843.180.000,00	100%	16.777.923.843,00	100%	17.861.472.000,00	100%	16.340.262.775,10	100%	19.571.710,000	25%	3.708,619.983	-			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN	131 orang	118.843.180.000,00	131 orang	16.777.923.843,00	131 orang	17.861.472.000,00	131 org	16.337.262,775	100%	19.544.170,000	118 org	3.702,516.983	-			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestralan/SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	90 Dokumen	200.100.000,000	0	-	18 dokumen	40.000.000,00	18 dokumen	33.000,000	100%	27.540,000	2 Laporan	6.313.000	-			



Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (SUBKEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2024		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN KE LUARAN KEGIATAN SD TA 2022 (N-2)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN KEGIATAN SD TA 2022 (N-2)		TARU ET PROGRAM DAN KEGIATAN DITAHUN 2023 (N-1)		Pencapaian Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) ter 1		Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
	Administrasi Kependudukan dan Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kependudukan	100%	590.000.000,00	0	-	100%	238.900.000,00	100%	238.900.000,00	100%	100%			0	-
	Pengadaan Pakan Di-las Beras Airbut Kelengkapannya	Jenis pakan dinas	3 jenis	590.000.000,00	0	-	2 jenis	238.900.000,00	2 jenis	238.900.000,00	100%	100%			0	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	7.347.530.000,00	99%	1.118.842.997,00	100%	1.387.582.451,00	100%	1.265.380.839,10	100%	97%	100%	336.368.500	29%	145.911.700
	Penyediaan Kompartemen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis kompartemen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	12 jenis	124.000.000,00	12 jenis	21.812.000,00	12 jenis	11.994.552,00	12 jenis	19.923.100	100%	100%	1 Paket	9.995.500	1 Paket	9.705.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis alat tulis kantor yang tersedia Jenis inventaris Kantor	5 jenis 45 jenis	1.620.000.000,00	42 jenis 15 Jenis	535.086.888,00	45 jenis 10 jenis	317.673.351,00	45 jenis 10 jenis	231.101.600	100%	93%	2 Paket	341.722.000	0	1.900.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga	20 jenis	152.027.500,00	27 jenis	16.294.500,00	20 jenis	21.999.152,00	20 jenis	24.877.100	100%	100%	1 Paket	15.000.000	1 Paket	14.807.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis makanan dan minuman yang tersedia	3 jenis	2.500.000.000,00	3 jenis	188.984.500,00	3 jenis	490.998.000,00	3 jenis	439.258.000	100%	100%	3 Paket	278.142.000	3 Paket	81.908.800
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia	17 jenis	630.000.000,00	18 Jenis	57.212.000,00	23 jenis	59.983.400,00	23 jenis	55.970.000	100%	88%	1 Paket	44.980.000	0	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah jenis rapat koordinasi dan konsultasi	2 jenis	2.218.002.500,00	2 jenis	294.462.888,00	2 jenis	340.904.000,00	2 jenis	344.380.900	100%	98%	12 Laporan	346.516.000	3 Laporan	57.309.840
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam pelayanan	100%	7.908.000.000,00	99%	154.950.000,00	100%	1.260.000.000,00	50%	656.964.300	50%	68%		-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	22 unit	7.900.000.000,00	3 unit	154.950.000,00	4 unit	1.260.000.000,00	2 Unit	656.964.300	30%	68%		-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan	100%	6.410.055.000,00	100%	943.924.795,00	100%	1.640.520.000,00	100%	1.638.386.084,10	100%	99%	100%	1.398.920.000	25%	288.342.328



Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SUBKATEGORI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Peringkat Daerah) Tahun 2024		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN KEGIATAN SD TA 2021 (N-3)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN KEGIATAN SD TA 2022 (N-2)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2023 (N-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Peringkat Daerah s/d tahun berjalan		
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
		pemerintahan daerah															
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 Bulan	2.380.189.000,00	12 Bulan	307.428.115,00	12 Bulan	280.000.000,00	12 bln	330.008.094	100%	97%	12 Laporan	386.800,000	3 Laporan	123,573.326	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan layanan jasa kebersihan kantor	12 bulan	4.029.366.000,00	12 bulan	636.486.660,00	12 bulan	689.520.000,00	12 bln	656.680,000	100%	100%	12 Laporan	712.120,000	3 Laporan	184.638.000	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah kondisi baik	100%	1.921.384.000,00	100%	454.956.244,00	100%	367.778.800,00	100%	356.320.800,00	100%	97%	100%	339.860,000	25%	49.838.000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajal dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	7 unit	854.714.000,00	21 unit	382.012.704,00	7 unit	136.900.000,00	1 unit	137.118,200	100%	98%	7 unit	158.980,000	1 unit	36.330.000	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	13 jenis	151.025.000,00	13 jenis	23.959.850,00	13 jenis	54.870.000,00	13 jenis	54.131,700	100%	98%	23 unit	29.880,000	11 unit	13.530.000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung yang terpelihara	4 gedung	915.785.000,00	4 gedung	78.983.680,00	4 Gedung	170.000.000,00	4 gedung	134.772,800	100%	95%	4 unit	150.000,000	0	-	-
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	persentase penyediaan sarana prasarana aparatur			100%	322.200.000,00							-	-	-	-	-
	Fasilitas Keprotokolan	Jumlah bulan pelaksanaan pengawalan	-		12 bulan	322.200.000,00							-	-	-	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	kecepatan rata-rata	28 km/jam	368.318.167,483	18,70	83.186.889,164	18,50	81.296.289,796	26,88	78.414.893,873	105,33 %	92%	26,00	66.303.994,750	15,91	10.184.968,468	-



Kode	URUSAN/BIK/URAIAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN NASUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KUALITAS KEGIATAN SD TA 2021 (N-3)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KUALITAS KEGIATAN SD TA 2022 (N-2)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN OFD TAHUN 2023 (N-1)		Pencapaian Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
			kinerja	Keuangan	kinerja	keuangan	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		kinerja	Keuangan	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) hr 1		Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
							kinerja	Keuangan	kinerja	Keuangan	kinerja	Keuangan			kinerja	Keuangan	
	Pemetaan Rencana Induk Jaringan LLJJ Kabupaten/Kota	cakupan integral perencanaan transportasi	100%	3.100.000.000,00	-	-	100%	971.000.000,00	100%	942.025.515	100%	97%	100%	200.000.000	-	-	-
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLJJ Kabupaten/Kota	jumlah dokumen	1 dokumen	400.000.000,00			1 dokumen	400.000.000,00	1 dokumen	374.140.000	100%	94%	-	-	0	-	-
	Pemetaan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLJJ Kabupaten/Kota	jumlah dokumen	24 dokumen	2.700.000.000,00			7 Dokumen	571.000.000,00	7 Dok	537.885.515	100%	99%	4 Dokumen	200.000.000	0	-	-
	Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan prasarana dan perlengkapan jalan	11,11%	232.816.522.713	11	33.122.129.108	11,11%	68.580.587.148	12,95%	54.518.380.818	101,46%	90%	11,11%	43.458.218.158	8	6.001.415.871	-
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah JP-2 yang dibangun/jumlah unit halte	9 unit halte, 1 pc	5.900.000.000,00	0	-	2 unit	201.000.000,00	2 unit	138.301.000	100%	99%	3 Unit	300.000.000	0	-	-
	Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jenis perlengkapan jalan	6 jenis	15.450.000.000,00	6 jenis	1.672.978.240,00	6 jenis	26.581.048.400,00	6 jenis	26.257.445.134	100%	99%	265 Unit	2.499.505.000	0	-	-
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	jumlah unit terpelihara	5 unit pc, 63 halte	1.075.000.000,00	10 Unit	138.888.150,00	10 unit (2 pc, 13 halte)	571.999.900,00	15 unit (2 pc, 13 halte)	372.795.300	100%	99%	10 Unit	115.000.000	0	-	-
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perencanaan Jalan	jumlah jenis	6 jenis	10.200.000.000,00	5 jenis	1.314.821.900,00	5 jenis	2.151.748.800,00	5 jenis	2.139.485.515	100%	98%	153 Unit	2.212.208.000	0	279.879.280	-
	Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (PJU)	jumlah unit pc	3,05 unit	188.811.522.713	591 Unit	28.833.722.265,00	660 unit	29.191.798.741,00	690 unit	23.853.603.719	81,33%	82%	952 unit	36.209.280.000	0	5.806.013.191	-
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perencanaan Jalan (PJU)	jumlah PJU terpelihara	29.000 unit	10.500.000.000,00	5800 unit	1.761.916.951,00	5800 unit	2.101.000.000,00	5800 unit	1.736.750.100	100%	86%	5800 unit	2.123.224.000	0	115.433.400	-
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	jumlah orang yang melalui terminal setiap tahun	31.901.000 orang	25.250.000.000,00	3821153 orang	4.758.047.671,00	4.506.000 orang	4.741.985.751,00	3.773.372 orang	4.566.298.816,00	91,92%	96%	50000 orang	5.185.397.000	12459 orang	1.013.917.608	-



Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN A SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Ranstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SD TA 2022 (N-2)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SD TA 2022 (N-2)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2023 (N+1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Ranstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) ter 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Ranstra (%)	
	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah unit	1 dokumen	200.000.000,00	0	-	0	-	0,00	-	-	-	1 Unit	544.450.000	0	-	-
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah unit	2 unit	200.000.000,00	0	-	0	-	0,00	-	-	-	0	-	0	-	-
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang terpelihara	1 terminal	24.650.000.000,00	1 terminal	4.756.047.671,00	1 terminal	4.746.985.750,00	1 term	4.536.298.616	100%	96%	1 terminal	5.340.947.000	1 term	1.013.997.608	-
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase rekomendasi yang dikehendaki	100%	3.500.000.000,00	100%	281.193.000,00	100%	289.735.300,00	1,00	382.529.130,00	87%	96%	100%	399.999.000	25%	11.600.000	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kawasan Kibupaten Kota	Jumlah lokasi parkir	7 Lokasi	3.500.000.000,00	7 lokasi	281.193.000,00	7 lokasi	289.735.300,00	7 lokasi	342.529.130	100%	96%	12 Laporan	399.999.000	3 LAPORAN	11.600.000	-
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	90%	19.838.186.750,00	97,8%	1.725.231.833,00	95%	2.129.875.600,00	92,35	1.925.513.189,00	100%	90%	95%	2.108.943.000	87,9%	220.914.230	-
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jenis sarana prasarana	2 jenis	9.000.000.000,00	0	-	0	-	0,00	-	-	-	14 Unit	230.626.000	0	-	-
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah tanda lulus uji	1000000	3.039.087.187,00	0	-	23000 set	549.997.150,00	10000 set	439.987.130	100%	89%	1 dokumen	540.000.000	0	-	-
	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah dokumen	2 dokumen	200.000.000,00	0	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	0	-	-
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara	2 jenis	442.050.500,00	2 jenis	102.559.500,00	2 jenis	229.999.750,00	2 jenis	158.668.309	100%	89%	11 Unit	89.991.000	0	-	-
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala	Jumlah layanan UPT PKB	12 bulan	6.907.039.000	12 bulan	1.822.672.333,00	12 bulan	1.269.988.750,00	12 bln	1.232.702.360	100%	95%	12 Laporan	1.128.326.000	3Laporan	220.914.230	-



Kode	JURUSAN/BIDANG/ URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SD TA 2021 (N-3)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SD TA 2022 (N-2)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2023 (N-1)		Pencapaian Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		Kinerja	Keuangan	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) ke 1		Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
							Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan			Kinerja	Keuangan	
	Kendaraan Bermotor																
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah dokumen	5 dokumen	250.100.000,00	0	-	1 dokumen	40.879.950,00	1 dokumen	44.145.300	90%	80%	1 Laporan	70.000.000		-	-
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase titik pengawasan kemacetan	60%	73.386.458.000,00	40%	12.093.891.850,00	40%	13.122.883.890,00	40,00	12.800.539.130,00	123%	98%	1 Laporan	50.000.000	0	-	-
	Pivotal Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen	0,00%	-	4 dokumen	263.879.000,00	0%	-	0,00	-	-	-	50%	13.295.382.400	50%	2.874.812.400	-
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan yang dilakukan dalam pengawasan dan pengendalian lalu lintas	12 bulan	71.306.456.000	12 bulan	11.650.012.050,00	12 bulan	12.722.884.400,00	12 bln	12.432.518.430	100%	98%	12 Laporan	13.373.563.400	3Laporan	2.846.212.400	-
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah Rapat koordinasi dengan transportasi kota	50 kali	2.000.000.000	2 Bulan, 11 Orang	180.000.000,00	10 kali	386.999.400,00	10 kali	338.020.700	100%	88%	11 Laporan	221.828.000	3Laporan	28.600.000	-
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Andalalin yang dikeksekusi	100%	400.000.000,00	12 bulan	123.541.800,00	100%	37.321.500,00	100%	37.321.500,00	96%	100%	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	jumlah dokumen kegiatan dan rekomendasi	160 dokumen	400.000.000,00	38 Dokumen	123.541.000,00	30 dokumen	37.321.500,00	15 dok	37.321.500	100%	100%	-	-	-	-	-
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	load factor	32,0%	7.050.000.000,00	27,90%	540.485.524,00	20,5	960.960.550,00	24,85	960.394.745,00	100%	94%	31	328.968.000	24,85	28.318.340	-



Kode	JURUSAN/BIDANG/ URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SD TA 2021 (N-2)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SD TA 2022 (N-2)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2023 (N-1)		Pencapaian Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							TARGET		REALISASI		CAPAIAN				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun s1) ke 1		Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
			kinerja	Keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	Keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	Keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan yang beroperasi	1 kendaraan	6.250.000,00	1 kendaraan	448.181.524,00	1 kendaraan	684.202.501,00	1 kendaraan	670.623.745	100%	98%	6 Unit	226.968,000	6 Unit	28.328.340	
	Pengendalian dan Pengawasan Kelengkapan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	6 dokumen	800.000,00	13 dokumen	94.304.000,00	1 dokumen	278.758.051,00	1 dok	212.971,000	100%	83%	12 Laporan	100.000,000	3 Laporan	-	-
	Pemetaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan kebijakan angkutan umum	100%	200.000,00	0%	-	0	-	0,88	-	-	-	100%	238.429,000	8	-	-
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	1 dokumen	200.000.000,00	0	-	0	-	0,00	-	-	-	1 dokumen	238.429,000	0	-	-
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	ratio ijin trayek	0,0022	1.577.000.000,00	0,002	264.140.000,00	0,0022	336.905.450,00	0,0023	328.680.830,00	91%	98%	0,0022	287.647,000	0,0023	33.900,020	-
	Fasilitasi Penerimaan Penyertaan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kerenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah orang pelayanan perizinan angkutan	3 orang, 12 bulan	827.000.000,00	3 Orang, 12 Bulan	144.705.000,00	3 orang	156.985.000,00	3 orang	154.256,000	100%	98%	12 Laporan	147.648,000	3 Laporan	33.900,020	-



Kode	JURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN N/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2024		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SD TA 2021 (N-2)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SD TA 2022 (N-2)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2023 (N-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							TARGET		REALISASI		CAPAIAN		kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
			kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kawasan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis	2 jenis	750.000.000,00	2 Jenis	119.435.000,00	2 jenis	179.935.450	2 jenis	174.424.930	100%	97%	2 Lapor an	138.998.900	0	-	-
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan perkeretaapian	100%	700.000.000,00	0	-	100%	518.119.450,00	100%	488.707.750,00	96%	96%	-	-	0	-	-
	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan pengelolaan perkeretaapian	100%	700.000.000,00	0	-	100	518.119.450,00	100%	488.707.750	100%	96%	-	-	0	-	-
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah dokumen	2 dokumen	600.000.000,00	0	-	1 dokum en	450.000.000,00	1 dok	433.094.200	100%	90%	0	-	0	-	-
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah pelaksanaan	1kali	100.000.000,00	0	-	1 kali	80.119.450,00	- kali	55.613.500	100%	93%	0	-	0	-	-
																	-
				919.827.303.462,50		73.563.076.963,00		105.966.275.940,00		97.151.645.281,00		91,68 %	-	88.075.139.550,0 0	-	14.458.990,67 8	-

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Perhubungan Kota Depok dan pencapaian target Renstra dari tahun 2021 sampai Tahun 2022 telah mencapai target capaian kinerja sesuai yang telah ditetapkan. Khusus pada tahun 2022, Dinas Perhubungan memiliki anggaran Rp.105.968.275.940 dengan realisasi keuangan Rp. 97.151.645.281 dan capaian 91,68 serta capaian fisik kinerja sebesar 98,92 %. Pada umumnya semua target baik program, kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan dengan baik. 1 (satu) sub kegiatan yang tidak terealisasi yaitu pengadaan motor patwal sebanyak 2 unit. Hal ini karena terkait proses TKDN dan tidak cukup waktu sampai akhir tahun. TKDN ini memang merupakan hal yang baru sehingga pelaksana kegiatan masih kurang memahami dan menjadi evaluasi di waktu yang akan datang. Efisiensi anggaran sebesar Rp 8.816.630.659, sebagian besar dari efisiensi pembayaran listrik PJU dan gaji pegawai karena banyak yang pensiun.

Berkaitan dengan evaluasi indikator kinerja utama, Dinas Perhubungan telah menetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Depok. Pencapaian dari indikator tersebut yaitu 1 indikator mencapai target yaitu v/c ratio (100%, kategori capaian sangat tinggi), 2 indikator tidak mencapai target yaitu Modashare (80,33% , kategori capaian tinggi) dan Nilai Sakip (99,57%, kategori capaian tinggi).

Penjabaran hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan target indikator yang ditetapkan tahun 2022 sebagai berikut :

a. Sasaran 1, Meningkatnya Kinerja Ruas Jalan yang Berkeselamatan dengan indikator kinerja V/C Ratio dengan target tahun 2022 adalah 0,77 (D).

Dinas Perhubungan pada tahun 2022, memiliki target v/c ratio 0,77 realisasi 0,77 dengan capaian 100%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Telah dilaksanakannya serah terima ruas jalan GDC ke Pemerintah Kota Depok, sehingga bisa dilakukan intervensi dengan perbaikan jembatan GDC dan ruas jalan yang rusak oleh Dinas dan berdampak pada kondisi lalu lintas lebih lancar
- b. Adanya peningkatan jalan Komjen Pol M Jasin (Akses UI) yang berdampak dan mempengaruhi volume lalu lintas dan kapasitas jalan menjadi lebih optimal sehingga kinerja ruas menjadi lebih baik.



- c. Dilakukannya manajemen rekayasa lalu lintas di Simpang Sengon dengan tujuan mengurangi pergerakan crossing sehingga meminimumkan tundaan dan memperlancar arus lalu lintas.
 - d. Adanya peningkatan jalan di ruas jalan Kartini oleh Dinas PUPR yang berpengaruh pada kapasitas jalan menjadi meningkat dan arus lalu lintas menjadi lebih lancar
 - e. Telah dioperasionalkannya akses tol Cijago Sesi 3 sehingga volume lalu lintas dari barat ke tengah dan timur Kota Depok dapat terurai dengan terdistribusinya perjalanan segmen Limo Cinere menuju Beji atau sebaliknya
 - f. Dilaksanakannya manajemen penanganan di Simpang Gong Sibolong (Jalan Tanah Baru) dengan peningkatan kapasitas ruas jalan melalui pelebaran jalan.
 - g. Adanya pengembangan infrastruktur dan teknologi (ATCS) dalam pemantauan arus lalu lintas dan simpang yang dapat berfungsi mengatasi kepadatan arus lalu lintas di simpang melalui pengaturan siklus secara adaptif terhadap antrian dan tundaan.
 - h. Tersusunnya kajian Masterplan Transportasi untuk perbaikan perencanaan transportasi di Kota Depok
 - i. Tersedianya anggaran penyediaan perlengkapan jalan (rambu, marka dan PJU) yang berfungsi memberikan arah di ruas jalan serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan sehingga mengurangi hambatan di ruas jalan dan memperlancar arus lalu lintas
 - j. Pengadaan dan pemeliharaan PJU menjadi faktor pendorong tercapainya indikator sasaran VC Ratio. Dengan adanya PJU, ruas jalan menjadi terang dan kendaraan bisa lebih lancar dan tingkat keselamatan juga lebih meningkat. Pada tahun 2022, pengadaan PJU sebanyak 890 unit
 - k. Adanya petugas pengawas arus lalu lintas yang membantu mengawasi arus lalu lintas dan melaporkannya sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.
 - l. Adanya penertiban parkir liar di badan jalan bekerjasama dengan Polres Kota Depok untuk mengurangi hambatan samping di ruas jalan sehingga arus lalu lintas menjadi lebih lancar.
- b. Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Transportasi Publik yang Berkelanjutan dengan indikator sasaran Modashare, target tahun 2022 18%, realisasi 14,46%, capaian 80,333%**

Perjalanan masyarakat untuk menuju suatu tempat tujuan dibagi menjadi dua moda, yaitu dengan menggunakan angkutan umum dan menggunakan kendaraan pribadi. Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan umum (Moda Share) yaitu dengan membandingkan jumlah perjalanan menggunakan angkutan umum per hari dengan total keseluruhan perjalanan per hari. Pada



Tahun 2022, dengan target 18%, aktualisasi perjalanan menggunakan angkutan umum mencapai 14.46% dengan capaian kinerja 80.33%. Akan tetapi realisasi ini juga tidak berbeda jauh dari kondisi DKI Jakarta yang modasharenya 14,76%.

ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, yaitu :

1. Hal ini terjadi dikarenakan masyarakat semakin ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Banyaknya jumlah penggunaan sepeda motor oleh masyarakat (akibat dari mudahnya skema pembiayaan/pembelian sepeda motor) juga turut mempengaruhi penggunaan moda transportasi umum. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, kenaikan jumlah kendaraan bermotor dua dari 918.025 (2021) menjadi 925.491 (2022) dan jumlah kendaraan pribadi dari 1.117.459 (2021) menjadi 1.132.673 (2022) dibandingkan dengan jumlah kendaraan umum yang justru menurun dari 5.518 menjadi 4.641 mengindikasikan masyarakat semakin memilih kendaraan bermotor dua dan pribadi untuk melakukan aktifitasnya dibandingkan dengan angkutan umum.
2. Rendahnya pertumbuhan investasi infrastruktur transportasi perkotaan dibandingkan dengan pertumbuhan pergerakannya (akibat pertumbuhan penduduk dan ekonomi).
3. Kurangnya konektivitas antara pusat dan sub pusat pelayanan kota. Hal ini akibat dari distribusi pelayanan kota dan hubungan antar pusat pelayanan kota belum terlayani dengan sarana dan prasarana (infrastruktur transportasi) yang memadai untuk mendukung pergerakan orang. Dampaknya berbagai ruas jalan menjadi padat pada jam-jam sibuk dan penyediaan angkutan umum yang juga masih belum memadai memaksa masyarakat menggunakan kendaraan sendiri atau kendaraan pribadi yang memang dirasa lebih nyaman. Saat ini memang terdapat angkutan kota yang beroperasi di Kota Depok dan bus pengumpan yang beroperasi dari Terminal Kota Depok menuju stasiun kereta api atau terminal Jakarta, namun ketersediaan angkutan umum tersebut belum terkoneksi dengan baik. Kurangnya jaringan jalan yang ada, khususnya di wilayah selatan Kota Depok dan koridor yang menghubungkan Barat-Timur Kota Depok semakin memperburuk konektivitas antar wilayah dalam Kota Depok.
4. Masalah transportasi belum tertangani dengan baik karena prasarana jalan tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan.
5. Belum adanya penyelesaian masalah transportasi berupa pengembangan sistem transportasi massal yang memerlukan dukungan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor, terutama di kawasan-kawasan pusat kota.

6. Hampir 50% angkutan umum di Kota Depok sudah tidak layak beroperasi sehingga butuh peremajaan untuk menarik masyarakat lebih senang menggunakan angkutan umum.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah diatas sebagai berikut :

- a. Adanya kegiatan pemasangan CCTV di halte BRT, pemasangan rambu dan marka dengan tujuan meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna angkutan umum
- b. Dilakukan review kajian SAUM sebagai perbaikan perencanaan pengembangan transportasi
- c. Adanya sinkronisasi kegiatan melalui RITJ BPTJ sehingga beban anggaran tidak hanya di Pemerintah Kota Depok
- d. Adanya kerjasama dengan Perusahaan Angkutan Umum untuk beroperasinya layanan JRC (Jabodetabek Residence Connection) dan JAC (Jabodetabek Airport connexion) untuk meningkatkan layanan angkutan umum terutama masyarakat yang akan ke jakarta dan bandara.
- e. Tersedianya bis sekolah untuk layanan antar jemput pelajar.
- f. Dilakukan perubahan Perda Retribusi Izin Trayek dengan pembebasan biaya retribusi sebagai bentuk insentif
- g. Diperkenalkannya badan angkutan umum sebagai tempat iklan untuk menjadi pendapatan alternative
- h. Sebagai upaya membangun konektivitas angkutan umum, telah disusun DED pembangunan terminal Sawangan.
- i. Mengajukan usulan kepada Kementrian Perhubungan untuk memberikan subsidi BTS melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Program Buy The Service dilakukan dengan membeli layanan (memberikan subsidi 100%) dari operator dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Pemerintah menempatkan diri diantara konsumen dan produsen. Pemerintah mengumpulkan ongkos yang dibayar konsumen lalu menggunakan uang itu untuk "membeli" layanan angkutan yang dilaksanakan oleh operator. Pemerintah menanggung risiko jika uang yang diterima dari konsumen tak cukup untuk membayar layanan yang telah diselenggarakan oleh produsen sehingga dapat meminimalisir tariff angkutan umum dan menarik masyarakat untuk menggunakannya.
- j. Merencanakan rerouting trayek atau mendesain ulang jaringan trayek agar konektivitas antar simpul menjadi efektif dan efisien.
- k. Telah disusunnya Masterplan Transportasi dan Rencana Induk Perkeretaapian sebagai dasar

perencanaan transportasi yang lebih komprehensif

- l. Optimalisasi pelayanan uji KIR PKB. Uji KIR PKB berpengaruh pada kelayakan kendaraan termasuk transportasi umum, sehingga masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi umum yang aman, nyaman dan selamat.

C Sasaran 3, Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Kinerja serta Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dengan indikator Nilai Sakip, target 70,25, realisasi 69,95, capaian 99,57%.

Indikator sasaran ini untuk mengukur dan mengevaluasi seluruh komponen manajemen kinerja di Dinas Perhubungan Kota Depok. Penilaian dan evaluasi indikator ini dilaksanakan oleh Inspektorat daerah setiap tahun. Dinas Perhubungan Kota Depok mencapai kategori B yang artinya akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Pada tahun 2022 mencapai realisasi 69,95% dengan capaian 99,57% yang artinya belum tercapai dari target 70,25%. Berbagai upaya dilakukan untuk perbaikan komponen komponen manajemen kinerja yang akan dievaluasi untuk Nilai Sakip.

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja diantaranya :

1. Sosialisasi target kinerja pertahun periode RPJMD dan Renstra 2021-2026 kepada pejabat struktural di Dinas Perhubungan.
2. Menyusun perjanjian kinerja mulai dari eselon 2 sampai unit terkecil.
3. Melaksanakan evaluasi dan monitoring kinerja secara setiap minggu di rakor struktural dan dilaporkan setiap pertriwulan per triwulan.
4. Melaksanakan desk khusus untuk pemegang IKU.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok yang diturunkan dalam Peraturan Walikota Depok nomor 79 tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kota Depok mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan dengan fungsi sebagai berikut :



1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikotaterkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan, ditetapkan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok yang memiliki hubungan keterkaitan dengan indikator standart pelayanan minimal adalah sebanyak 3 (tiga) indikator sebagaimana berikut :

1. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan indikator tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
2. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan dengan indikator Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
3. Fasilitas Perlengkapan Jalan dengan indikator Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.

Capaian ke 3 layanan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :



Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Depok

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Standar Pelayanan Minimal	Indikator Di Renstra	TARGET RENSTRA					REALISASI				
					TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	Angkutan Jalan	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	Persentase kelaysakan pengoperasian kendaraan umum	95%	95%	95%	95%	95%	92,35%	-	-	-	-
		Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	Jumlah terminal terpelihara secara layak	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	-	-	-	-
		Fasilitas Penengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas penengkapan jalan seperti penempatan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	Persentase panjang jalan di Kota Depok terlayani PJU	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,84%	-	-	-	-

Analisis capaian kinerja pelayanan diatas sebagai berikut :

1. Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tidak mencapai target

Permasalahan:

1. banyaknya kendaraan yang mutasi
2. sarpras terutama lahan parkir layanan Uji KIR belum memadai
3. belum ada system informasi pelayanan yang terintegrasi sehingga kurang efektif dan efisien

Upaya mengatasi permasalahan:

1. peningkatan pengawasan terhadap wajib uji
2. perbaikan layanan dengan pembayaran secara online bekerjasama dengan BKD dan BJB
3. melaksanakan penyusunan perencanaan lahan parkir dan berkordinasi dengan rumkin terkait pengadaan tanah dan pembangunannya.

2. Jumlah terminal terpelihara secara layak

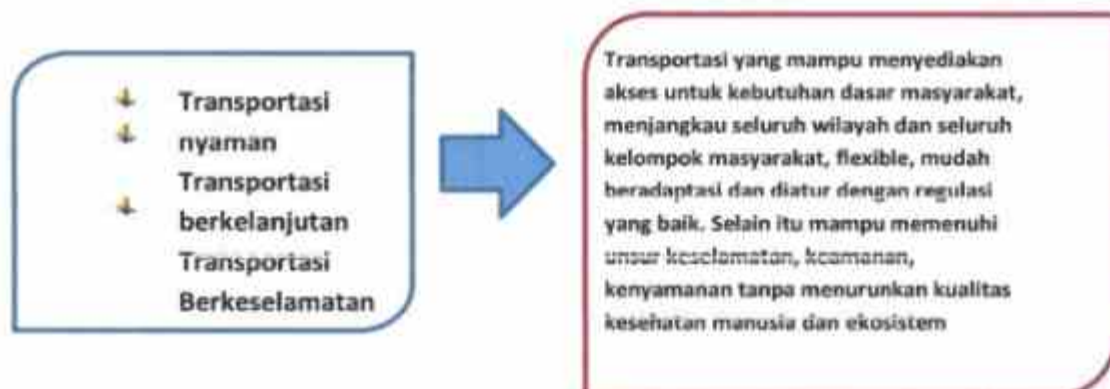
Kondisi terminal Margonda masih terkendala lahan. Akan tetapi di tahun 2023 dianggarkan pembangunan terminal Sawangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

3. Persentase panjang jalan di Kota Depok terlayani PJU

Pelayanan Pju mencapai 890 unit dari target 900 unit. 890 unit terbut terdiri dari pengadaan PJU etnik 25 unit, PJU 695 unit dan PJL melalui dana kelurahan 200 unit. Pengadaan PJL dari pokir sebanyak 170 unit tidak terserap karena gagal lelang dan tidak cukup waktu untuk mengulang.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Dalam mencapai target dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Depok, Dinas Perhubungan mengusung paradigma harapan untuk urusan perhubungan dan pengembangan transportasi di Kota Depok yaitu :



Sesuai dengan Misi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2022-2026 Dinas Perhubungan Kota Depok mengacu ke Misi 1 dan 2 yaitu :

Misi 1 :

- **MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**
- **MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG MODERN DAN PARTISIPATIF**

Dalam upaya meningkatkan pengembangan pelayanan, maka Dinas Perhubungan Kota Depok harus mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang dihadapinya berdasarkan tugas dan fungsinya sebagaimana dirumuskan pada tabel dibawah ini :

 **Tabel 2.3 Isu Strategis dan Telaah Permasalahan Bidang Perhubungan**

No.	Isu Strategis	Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
(1)	(2)	(3)
1.	Infrastruktur jalan terbatas	• Terbatasnya ruas serta kapasitas jalan dan simpang (lintas urusan). • Pusat pertumbuhan belum terbentuk secara merata (lintas urusan) • Belum semua jalan bermarka dan dilengkapi rambu serta PJU
2.	Transportasi publik belum memadai	• Angkutan kota kurang nyaman • BRT (<i>Bus Rapid Transit</i>) dan JRC (<i>Jabodetabek Residence Connection</i>) masih terbatas • Belum adanya subsidi bagi angkutan umum • Angkutan massal berbasis rel di 4 (empat) koridor belum terlaksana
3.	Integrasi dan konektivitas transportasi belum terbentuk	• TOD atau hub belum terlaksana • Simpul transportasi masih kurang memadai • Park and Ride belum tersedia • Halte belum merata • Belum adanya sistem layanan transportasi yang terintegrasi • First and last mile tidak efisien

Dinas Perhubungan merupakan unit teknis di Pemerintah Daerah Kota Depok yang terkait dengan transportasi. Transportasi merupakan sarana yang penting dalam menunjang perekonomian dan pembangunan. Sesuai dengan tema Forum OPD Dinas Perhubungan Tahun 2024, ***Berkolaborasi Mewujudkan Transportasi Yang Aman, Nyaman dan Selamat melalui Komitmen Peningkatan Pelayanan Perhubungan***, berbagai upaya dilakukan agar angkutan umum kembali menjadi pilihan utama masyarakat dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Perkembangan Pembangunan di berbagai sektor tentunya juga membawa dampak bagi permasalahan transportasi. Masalah transportasi di kawasan perkotaan dapat berupa gangguan keselamatan dan kelancaran atau kemacetan lalu lintas.

Dengan kondisi V/C Ratio 0,77, Kecepatan rata-rata 26,86 dan level of service "D", kemacetan lalu lintas menjadi realitas kehidupan Kota Depok yang harus dihadapi, baik di setiap persimpangan maupun pada ruas-ruas jalan utama seperti Jalan Margonda Raya, Jalan Nusantara Raya, Jalan Dewi Sartika, Jalan Kartini, Jalan Tole Iskandar, Jalan Raya Bogor, Jalan Ir. H. Djuanda, Jalan M. Yasin, Jalan Raya Sawangan, Jalan Muchtar Raya dan Jalan Bandung. Kemacetan ini terjadi pada saat peak hour di pagi dan sore hari ketika weekday dan di sepanjang hari ketika weekend (Sabtu dan Minggu).

Untuk menopang kebutuhan warga dalam memenuhi kebutuhan transportasi publik, saat ini kondisi angkutan umum terutama angkutan kota (angkot) banyak yang tidak layak. Dari data awal jumlah angkot sebanyak 2810 unit, yang berbadan hukum dan berizin hanya 1497 unit atau 53,27%, itupun kondisinya banyak yang sudah tidak layak karena tidak mampu lagi untuk diremajakan. Maraknya angkutan online menjadi penyebab kurang menariknya warga menggunakan angkot, sehingga load factor angkutan umum hanya mencapai 24,85%. Dibawah ini pemetaan permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan sebagai berikut:



Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan antara lain adalah:

1. Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi.
2. Keterbatasan alokasi anggaran. Kurang lebih 50% pagu anggaran dialokasikan untuk pembayaran rekening listrik PJU dan honor non ASN sehingga banyak perencanaan kegiatan yang tidak bisa terealisasi
3. Belum optimalnya sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan seperti crane, kendaraan operasional, kendaraan derek, ruang pelayanan UPT PKB dan lahan parkir PKB.
4. Masih minimnya penggunaan teknologi dalam pelayanan perhubungan,

5. Belum optimalnya Integrasi antar moda sehingga dapat mengefisienkan biaya, tenaga dan waktu pengguna jasa transportasi.
6. Kemacetan Lalu lintas dengan faktor yang mempengaruhi sebagai berikut :
 - Kinerja jaringan jalan, kapasitas jalan dan simpang kurang memadai. Hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan jalan di Kota Depok karenamakin meningkatnya pemukiman (residensial) sehingga peluang memperlebar jalan untuk memperlancar transportasi menjadi sulit.
 - Maraknya transportasi daring yang minim pengawasan dari pemerintah sehingga kinerja angkutan umum menurun. Dan juga pola hidup masyarakat yang lebih senang menggunakan kendaraan pribadi.
 - transportasi publik kurang nyaman, sehingga tidak menjadi pilihan utama masyarakat.
 - Perilaku pengguna jalan kurang tertib dan kurangnya fasilitas parkir. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Dari permasalahan yang ada maka peluang yang bisa diambil yaitu :

1. Komitmen Kepala Daerah dalam mengatasi kemacetan di Kota Depok
2. Usulan Anggaran ke Pemerintah provinsi Jawa Barat dan Pusat (Kementrian Perhubungan)
3. Perhatian dari Bappeda Kota Depok untuk mengintegrasikan perencanaan baik dari Dinas Perhubungan, Dinas PU dan Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai upaya mengurai kemacetan.
4. Adanya Studi Kelayakan Pengembangan Transportasi Massal Berbasis rel dalam upaya pengembangan sistem angkutan umum masal (SAUM) yang memadai sebagai upaya untuk menarik kembali pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengurangi kemacetan;
5. Adanya kerjasama dengan BRT/JRC DAN BAC;
6. Terbentuknya Dewan Transportasi Kota Depok sebagai pendorong terlaksananya kebijakan urusan Perhubungan.
7. Untuk optimalisasi layanan diusulkan UPT PJU wilayah Barat, UPT Transportasi Publik dan UPT Parkir.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Rencana Kerja Dinas Perhubungan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2022-2026. Dengan tema pembangunan Kota Depok Tahun 2024 yaitu **MEMANTAPKAN KEHIDUPAN KOTA DEPOK YANG MAJU BERBUDAYA DAN SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN DASAR** dan tema forum OPD Dinas Perhubungan **MEWUJUDKAN TRANSPORTASI YANG AMAN, NYAMAN DAN SELAMAT MELALUI KOMITMEN PENINGKATAN PELAYANAN PERHUBUNGAN**.

Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Depok telah merencanakan 2 Program, 17 Kegiatan dan 40 Sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar RP. 86.019.060.000. Review terhadap rancangan awal RKPD untuk melihat bahwa ada beberapa kegiatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan diantaranya :

NO	SUB KEGIATAN	Kebutuhan Anggaran	KETERANGAN
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 8.000.000.000	- Kekurangan pembayaran listrik PJU Rp 5.000.000.000 - Persiapan UPT PJU baru Rp 1.000.000.000 (sarpras) - Pengadaan PJU Etnik (Akses UI dan Cinere Rp. 2.000.000.000
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 2.700.000.000	Kebutuhan penambahan anggaran untuk : a. pengadaan bis sekolah Rp 700.000.000 (eksisting hanya ada 1 unit) b. pengadaan crane PJU Rp. 2.000.000.000 (persiapan UPT PJU baru)
3	Pembangunan Gedung Terminal Sawangan	Rp 2.700.000.000	Sudah ada DED nya di tahun 2022
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala	Rp. 6.000.000.000	Sudah ada review kajian lahan parkir di

	Kendaraan Bermotor		Perubahan Anggaran tahun 2022
	TOTAL	Rp. 19.400.000.000,-	(Sembilan belas milyar empat ratus juta rupiah)

Hasil review dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Dinas Perhubungan Kota Depok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan 2024	ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			100 %	86.019.060.000	105.419.060.000	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			100 %	86.019.060.000	105.419.060.000	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	26.178.060.000	28.878.060.000	
2	15	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	165.000.000	165.000.000	
2	15	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	2 dokumen	110.000.000	110.000.000	
2	15	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	7 Laporan	55.000.000	55.000.000	
2	15	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan tepat waktu		100 %	19.041.800.000	19.041.800.000	
2	15	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	131 orang	19.000.000.000	19.000.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan 2024	ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana		
2	15	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	7 laporan	41.800.000	41.800.000	
2	15	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	300.000.000	300.000.000	
					Penyediaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	1 paket	100.000.000	100.000.000	
					bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	120 Orang	200.000.000	200.000.000	
2	15	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penyediaan administrasi umum perkantoran		100 %	1.283.662.000	1.283.662.000	
2	15	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	1 paket	12.000.000	12.000.000	
2	15	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	2 paket	439.662.000	439.662.000	
2	15	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	1 paket	12.000.000	12.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan 2024	ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana		
2	15	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	3 paket	350.000.000	350.000.000	
2	15	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	1 paket	25.000.000	25.000.000	
2	15	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 laporan	445.000.000	445.000.000	
2	15	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah dalam pelayanan		100%	3.562.598.000	6.262.598.000	
					Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah paket pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	4 Unit	3.562.598.000	6.262.598.000	
2	15	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	1.390.000.000	1.390.000.000	
2	15	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 Laporan	670.000.000	670.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan 2024	ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana		
2	15	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Depok, Cilodong, Semua Kelurahan	12 laporan	720.000.000	720.000.000	
2	15	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah kondisi baik		100 %	435.000.000	435.000.000	
2	15	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	18 unit	205.000.000	205.000.000	
2	15	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	41 unit	30.000.000	30.000.000	
2	15	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	4 unit	200.000.000	200.000.000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kecepatan Rata-rata		26,5 Km/jam	59.841.000.000	76.541.000.000	
2	15	02	2,01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Cakupan Integrasi Perencanaan Transportasi		100 %	375.000.000	375.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan 2024	ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana		
2	15	02	2,01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	4 dokumen	375.000.000	375.000.000	
2	15	02	2,02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan prasarana dan perlengkapan jalan		7,23 %	5.380.000.000	5.380.000.000	
2	15	02	2,02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	2 unit	230.000.000	230.000.000	
2	15	02	2,02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia, Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	250 unit	2.400.000.000	2.400.000.000	
2	15	02	2,02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 unit	350.000.000	350.000.000	
2	15	02	2,02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	100 unit	2.400.000.000	2.400.000.000	
2	15	02	2,04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	persentase rekomendasi yang dikeluarkan		100 %	400.000.000	400.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan 2024	ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana		
2	15	02	2,04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 laporan	400.000.000	400.000.000	
2	15	02	2,06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase titik pengawasan kemacetan		62,50 %	13.100.000.000	13.100.000.000	
2	15	02	2,06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 laporan	12.900.000.000	12.900.000.000	
2	15	02	2,06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	10 laporan	200.000.000	200.000.000	
2	15	02	2,07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		100%	25.000.000	25.000.000	
2	15	02	2,07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 Laporan	25.000.000	25.000.000	
2	15	02	2,09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Load factor		31 %	706.000.000	706.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan 2024	ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana		
2	15	02	2,09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	6 unit	606.000.000	606.000.000	
2	15	02	2,09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 Laporan	100.000.000	100.000.000	
2	15	02	2,14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	rasio Ijin Trayek		0.0022 nilai	645.000.000	645.000.000	
2	15	02	2,14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 Laporan	165.000.000	165.000.000	
2	15	02	2,14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	umlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 Laporan	480.000.000	480.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan 2024	ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				5.150.000.000	7.850.000.000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kecepatan rata-rata		26,5 Km/jam	5.150.000.000	7.850.000.000	
2	15	02	2,03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Orang Yang Melalui Terminal Setiap Tahun		5500000 Orang	5.150.000.000	7.850.000.000	
2	15	02	2,03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya		0	2.700.000.000	
2	15	02	2,03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan dipelihara	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	1 Unit	5.150.000.000	5.150.000.000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				32.100.000.000	40.100.000.000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kecepatan rata-rata		26,5 Km/jam	32.100.000.000	40.100.000.000	
2	15	02	2,02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Prasarana dan perlengkapan jalan		3,88 %	32.100.000.000	40.100.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan 2024	ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana		
2	15	02	2,02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	700 unit	30.000.000.000	38.000.000.000	
2	15	02	2,02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	5800 unit	2.100.000.000	2.100.000.000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	kecepatan rata-rata		26,5 Km/jam	1.960.000.000	7.960.000.000	
2	15	02	2,05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum		95 %	1.960.000.000	7.960.000.000	
2	15	02	2,05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	5 unit	335.000.000	8.335.000.000	
2	15	02	2,05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	1 dokumen	55.000.000	55.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan 2024	ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana		
2	15	02	2,05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	1 unit	250.000.000	250.000.000	
2	15	02	2,05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 laporan	1.270.000.000	1.270.000.000	
2	15	02	2,05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	1 laporan	50.000.000	50.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari mengadakan Forum Renja yang di hadiri dari berbagai unsur diantaranya :

1. Perwakilan Kecamatan
2. Unsur OPD
3. Wakil Kelompok masyarakat antara lain :
 - a. Kepolisian
 - b. LPM Kecamatan
 - c. LPM Kelurahan
 - d. Organda
 - e. Forum Anak Kota Depok, perwakilan Osis Sekolah
 - f. Organisasi Wanita seperti PKK, GOWD, Dharma Wanita
 - g. Perusahaan, baik perdagangan dan jasa

Hampir setiap tahun, usulan masyarakat biasanya terkait penerangan jalan lingkungan. Mulai Tahun 2020 Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan bisa diakomodir atau dianggarkan melalui dana kelurahan dan dikelola di masing masing kelurahan. Akan tetapi dalam rencana penganggaran Tahun 2024, Dinas Perhubungan juga mengakomodir Pokok Pikiran dari DPRD Kota Depok yang telah di survey dan tertuang dalam Berita Acara yang menyatakan layak atau tidak layak. Usulan tersebut sebagaimana dibawah ini :

**Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	H. MOH. HAFID NASIR	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	Jakan Program Raya RT 004 RW 004 Pancoranmas - Pancoran Mas, Kota Depok	Layak untuk direkomendasikan	50	Titik	227,200,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2	YUNI INDRIANY, SE., M. Si	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	BSI, Bumi Sawangan Indah Rt. 006 Rw. 010 Kel. Pengasinan Kec. Sawangan, Kota Depok	Layak untuk direkomendasikan	10	Titik	45,440,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3	YUNI INDRIANY, SE., M. Si	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	Lingkungan Rt. 001 Rw. 005 Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung, Kota Depok	Layak untuk direkomendasikan	11	Titik	49,984,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
4	H. EDI MASTURO, S.E	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	JLN LINGKUNGAN RT 04 RW 04 KEL RANGKAPAN JAYA BARU KEC PANCORAN MAS, Kota Depok	Layak untuk direkomendasikan	10	UNIT	45,440,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
5	AZHARI, S.Ag	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	Jl Lingkungan H. Jarih RT. 006 / RW. 009 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya , Kota Depok	Layak untuk direkomendasikan	10	titik	45,440,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
6	Hj. ENDAH WINARTI, S.H	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	LINGKUNGAN RW 02 KELURAHAN SUKMAJAYA KECAMATAN SUKMAJAYA, Kota Depok	Layak untuk direkomendasikan	20	titik	90,880,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
7	Hj. REZKY M. NOOR	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	jalan lingkungan RW 03 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji, Kota Depok	Layak untuk direkomendasikan	10	unit	45,440,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
8	Hj. REZKY M. NOOR	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	jalan lingkungan RT 04 RW 10 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji, Kota Depok	Layak untuk direkomendasikan	10	unit	45,440,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
9	YETI WULANDARI, S.H	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	RT 003 RW 012 KEL. PASIR GUNUNG SELATAN KEC. CIMANGGIS, Kota Depok	Layak untuk direkomendasikan	10	TITIK	45,440,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
10	H. MOHAMAD HB, S.E	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	JL. H. SALEH RT 02 RW 06 KEL. LIMO KEC. LIMO, Kota Depok	Layak untuk direkomendasikan	10	unit	45,440,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
11	HJ. INDAH ARIANI, S.H	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	Jl. Bukit Cengkeh 1 RW 015, Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok	Layak untuk direkomendasikan	20	titik	90,880,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
12	HJ. INDAH ARIANI, S.H	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	Jl.Tipar Lingkungan RT 006/RW 006, Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis Kota Depok, Kota Depok	Layak untuk direkomendasikan	10	titik	45,440,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
13	HJ. INDAH ARIANI, S.H	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	Kp.Areman, Rt001/005 No 12, Kel.Tugu, Kec.Cimanggis Kota Depok, Kota Depok	Layak untuk direkomendasikan	30	titik	136,320,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
14	VERONICA WIWIN WIDARINI, S.E., MMSI	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	JL. KERINCI RAYA, JL. kerinci 3,4,5 RT. 05, 06, 07 dan Rt 08 RW 017 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis, Kota Depok	Layak untuk direkomendasikan	10	TITIK	45,440,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
15	VERONICA WIWIN WIDARINI, S.E., MMSI	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	Perumahan Buana Asri RT. 008 RW 04 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis, Kota Depok	Layak untuk direkomendasikan	10	titik	45,440,000.00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
					231		1,049,664,000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, sasaran pembangunan lima tahunan tahap ke-4 (RPJMN 2020-2025) diarahkan pada ***Terwujudan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif***. Perwujudan kondisi maju dan sejahtera akan dapat dicapai dengan dukungan penyelenggaraan jaringan transportasi yang andal dan aman bagi seluruh masyarakat.

Berpijak pada pendekatan tersebut, maka fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tercermin dalam sasaran dalam RPJMD 2021-2026 Kota Depok yaitu ***TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG MERATA, BERKUALITAS, RAMAH DAN NYAMAN*** dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Depok yaitu ***MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG BERKESELAMATAN DAN BERKELANJUTAN***.

Berikut telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu :

**3.1 Telaahan Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Depok Berdasarkan Sasaran Renstra
Kementerian Perhubungan Beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

VISI: KOTA DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA				
NO	SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
I	Misi 1: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan			
1	Terwujudnya konektivitas nasional	Integrasi dan konektivitas transportasi di Kota Depok belum terbentuk	- TOD atau hub belum terlaksana - Simpul transportasi masih kurang memadai - Park and Ride belum tersedia - Halte belum merata - Belum adanya sistem layanan transportasi yang terintegrasi First and last mile tidak efisien	- Sudah mulai tersedia anggaran walaupun masih minim untuk pengembangan transportasi - Adanya kerjasama dengan BRT, JRC dan JAC - Adanya kajian Studi Kelayakan Pengembangan Transportasi Massal Berbasis rel
2	Meningkatnya Kinerja layanan	- Sarana prasarana pelayanan belum memadai seperti sarpras layanan Uji	- Gedung layanan uji KIR kurang layak karena sudah lama dan perlu perbaikan	- Adanya kerjasama dengan BRT, JRC dan

	Perhubungan	KIR - Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam layanan perhubungan - Ketersediaan anggaran yang terbatas	- sarana parkir layanan uji KIR belum memadai - kurangnya anggaran untuk pengembangan dan penerapan teknologi dalam pelayanan - pagu anggaran 50% untuk pembayaran listrik PJU dan gaji nonASN sehingga anggaran untuk kegiatan sangat minim	JAC - Adanya kajian Studi Kelayakan Pengembangan Transportasi Massal Berbasis rel - Meningkatkan fasilitas angkutan umum seperti angkot ber AC
	- Meningkatnya keselamatan Transportasi - Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang kompeten	- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, kebutuhan rambu dan marka belum terpenuhi di semua ruas jalan, layanan PJU belum optimal - Belum optimalnya sarpras pengujian kendaraan sebagai kontrol keselamatan transportasi - Kurangnya SDM di bidang transportasi, minimnya keikutsertaan diklat	- kesadaran berlalu lintas masih minim, anggaran terbatas untuk rambu dan marka, masih bnyak titik black spot yang belum tertangani, anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan pju terbatas, gap antara kebutuhan pju dan realisasinya msh tinggi - terbatasnya anggaran untuk pengadaan sarpras pengujian seperti Gedung yang kurang layak dan belum adanya lahan parkir yang memadai untuk layanan uji kir - minimnya lulusan dari bidang transportasi di Dishub Depok, anggaran dan waktu yang terbatas untuk keikutsertaan diklat	- Komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan layanan PJU - Adanya dana kelurahan yang dialokasikan untuk pengadaan PJL - Adanya bantuan anggaran dari propinsi dan pusat untuk pengadaan PJU.
	- Meningkatnya kualitas tata Kelola kebijakan, regulasi dan hukum	- Kurangnya formulasi kebijakan yang mampu merespon dengan cepat dinamika kondisi transportasi - Penatausahaan administrasi dan keuangan belum optimal	Minimnya SDM di Dinas Perhubungan, Sebagian besar berada di unit teknis	- Mulai adanya pembaharuan peraturan dan kebijakan di Dishub Depok

	- Meningkatnya Pengawasan dan pengendalian - Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik	- Belum optimalnya pelaksanaan good governance		- Di beberap unit sudah menerapkan ISO - Minimnya temuan audit keuangan di Dishub Depok - Adanya review secara kontinyu atas dokumen perencanaan dan monev - Adanya aplikasi SIEP untuk monev capaian kinerja - LHE Sakip memperoleh nilai B, Indeks RB memperoleh nilai Baik
--	---	--	--	---

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan

Dalam visi misi Kota Depok, ada dua misi yang menjadi acuan Dinas perhubungan yaitu :

Tabel 3.2 Visi dan Misi Yang Diemban Dinas Perhubungan

VISI	MISI
VISI: DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA	• Misi I Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan • Misi 2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Modern dan Partisipatif

Dalam mencapai misi misi tersebut, ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.3. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET CAPAIAN 2024
Terwujudnya layanan transportasi yang berkeselamatan dan berkelanjutan	Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan dan berkelanjutan	V/C RATIO	0,72
Terlaksananya akuntabilitas dan pengawasan kinerja Dinas Perhubungan	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kinerja serta Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional	NILAI SAKIP	71

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Depok yang telah dirumuskan, disusun sejumlah rencana program dan kegiatan disertai dengan rumusan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif program. Berdasarkan hasil evaluasi dan review Bappeda Kota Depok serta memenuhi kebutuhan anggaran di Dinas Perhubungan, perlu ditambah 1 program yaitu Program Pengelolaan Perkeretaapian. Program dan kegiatan yang perlu direncanakan dalam rencana kerja Tahun 2024 agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan mampu dicapai melalui 3 program, 18 kegiatan dan 40 subkegiatan. Program yang dijalankan yaitu :

- a) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
- b) PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**
- c) PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**

Arah kebijakan dan fokus kegiatan Dinas Perhubungan sebagai berikut :

1. Pengembangan layanan angkutan umum
2. mewujudkan kota Depok yang terang dengan peningkatan pelayanan PJU
3. Upaya berkelanjutan dalam penanganan kemacetan bersinergi dengan Dinas PU dan Rumkim
4. Optimalisasi kegiatan penunjang layanan uji KIR, salah satunya dengan pemerataan lahan parkir.
5. Pemenuhan sarana lalu lintas dan perlengkapan jalan dalam rangka keselamatan berlalu lintas
6. Pembayaran gaji/honor rutin petugas pengaturan lalu lintas untuk pengawasan kemacetan lalu lintas
7. Optimalisasi kegiatan penunjang layanan terminal
8. Meningkatkan tertib dan keselamatan berlalu lintas
9. Kebutuhan rutin penunjang kegiatan Dinas Perhubungan sebagai pendukung pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan terutama peningkatan teknologi informasi, sarpras komputer, pengadaan kendaraan penunjang teknis pelayanan.

Uraian rencana program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan
Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Depok

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Rencana 2025	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
									85.781.952.989		Rp 108.564.381.250
2									85.781.952.989		Rp 108.564.381.250
2	15								85.781.952.989		Rp 108.564.381.250
2	15	01							26.204.029.639		Rp 31.550.915.000
2	15	01	2.01						149.599.100		Rp 165.900.000
2	15	01	2.01	01							Rp 55.000.000
		Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	- Kota Depok, Cilandong, Jatimulya	100 %	2 Dokumen	100 persen	99.659.600	2 Dokumen	100.000.000,00
2	15	01	2.01	06							
		Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	- Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	100 %	7 Laporan	100 persen	49.939.500	7 Laporan	65.000.000,00
2	15	01	2.02						19.716.395.739		Rp 28.156.800.000

Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Rencana 2025	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
						Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	persentase administrasi keuangan tepat waktu	- Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	100 %	125 Orang/bulan	100 persen	19.674.614.339	125 Orang/bulan	26.116.800.000,00
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
						Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	persentase administrasi keuangan tepat waktu	- Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	100 %	7 Laporan	100 persen	41.781.400	7 Laporan	40.000.000,00
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								299.658.000		Rp 400.000.000
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
						Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian	- Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	100 %	1 Paket	100 persen	99.684.000	1 Paket	200.000.000,00
2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
						Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian	- Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	100 %	120 Orang	100 persen	199.974.000	120 Orang	200.000.000,00
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.243.739.800		Rp 1.512.300.000
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
						Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	persentase penyediaan administrasi umum perkantoran	- Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	100 %	1 Paket	100 %	11.910.500	1 Paket	27.000.000,00
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Rencana 2025	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
						Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	persentase penyediaan administrasi umum perkantoran	- Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	100 %	399.999.800	2 Paket	330000000
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	persentase penyediaan administrasi umum perkantoran	- Kota Depok, Cilandong, Jatimulya	100 %	3 Paket	100 %	11.998.500	3 Paket	33275000
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
						Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	persentase penyediaan administrasi umum perkantoran	- Kota Depok, Cilandong, Jatimulya	100 %	3 Paket	100 %	349.952.000	3 Paket	500000000
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
						Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	persentase penyediaan administrasi umum perkantoran	- Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	100 %	24.992.000	2 Paket	135000000
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
						Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penyediaan administrasi umum perkantoran	- Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	444.887.000	12 Laporan	487025000
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2.973.799.000		1.500.000.000,00
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	persentase barang milik daerah dalam pelayanan	- Kota Depok, Cilandong, Jatimulya	100 %	4 Unit	100 %	2.973.799.000	4 Unit	1.500.000.000,00

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Rencana 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.388.728.000		Rp 1.397.550.000
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
					Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	- Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	670.000.000	12 Laporan	519.090.000,00	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
					Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	- Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	100 %	12 Laporan	100 %	718.728.000	12 Laporan	878.460.000,00	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								432.110.000		Rp 419.265.000
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
					Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	persentase barang milik daerah kondisi baik	- Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	18 Unit	100 %	204.840.000	18 Unit	186.340.000,00	
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
					Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	persentase barang milik daerah kondisi baik	- Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	100 %	41 Unit	100 %	29.620.000	41 Unit	33.275.000,00	
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
					Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	persentase barang milik daerah kondisi baik	- Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Unit	100 %	197.650.000	4 Unit	199.650.000,00	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								59.478.740.200		Rp 77.013.466.250

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024					Rencana 2025	
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								375.000.000		600.000.000,00
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	cakupan integrasi perencanaan transportasi	- Kota Depok, Cibodong, Jatimulya	25,5 km/jam	5 Dokumen	100 persen	375.000.000	5 Dokumen	600.000.000,00	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								4.726.025.600		Rp 5.900.000.000
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	persentase ketersediaan prasarana dan perlengkapan jalan	- Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25,5 km/jam	2 Unit	7,23 %	213.700.000	2 Unit	200.000.000,00	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	persentase ketersediaan prasarana dan perlengkapan jalan	- Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25,5 km/jam	250 Unit	7,23 %	1.121.784.600	250 Unit	3.350.000.000,00	
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan										
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	persentase ketersediaan prasarana dan perlengkapan jalan	- Kota Depok, Cibodong, Jatimulya	25,5 km/jam	12 Unit	7,23 %	299.999.000	12 Unit	150.000.000,00	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan										
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	persentase ketersediaan prasarana dan perlengkapan jalan	- Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25,5 km/jam	100 Unit	7,23 %	3.090.542.000	100 Unit	2.200.000.000,00	
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								343.279.900		800.000.000,00
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kawasan Kabupaten/Kota										

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Rencana 2025	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
		Kecepatan rata-rata	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbenggunya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase rekomendasi parkir yang dikeluarkan	- Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	26,5 km/jam	12 Laporan	100 persen	343.279.900	12 Laporan	800.000.000,00
2	15	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					13.047.590.300		Rp 15.400.000.000
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						
		Kecepatan rata-rata	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase titik pengawasan kemacetan	- Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	26,5 km/jam	12 Laporan	62,5 persen	12.848.153.000	12 Laporan	15.000.000.000,00
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota						
		Kecepatan rata-rata	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase titik pengawasan kemacetan	- Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	26,5 km/jam	10 Laporan	62,5 persen	199.437.300	10 Laporan	400.000.000,00
2	15	02	2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					25.000.000		100.000.000,00
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin						
		Kecepatan rata-rata	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Persentase Andalalin yang diterbitkan	- Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	26,5 km/jam	12 Laporan	100 %	25.000.000	12 Laporan	100.000.000,00
2	15	02	2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					544.684.000		Rp 1.140.000.000
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
		Kecepatan rata-rata	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	load factor	- Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	26,5 km/jam	6 Unit	21 %	544.684.000	6 Unit	1.000.000.000,00
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Rencana 2025	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	load factor	- Kota Depok, Cibodong, Jatimulya	26,5 km/jam	12 Laporan	31 %	100.000.000	12 Laporan	140.000.000,00	
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							549.388.600		Rp 330.900.000	
2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	rasio ijin trayek	- Kota Depok, Cibodong, Jatimulya	26,5 km/jam	12 Laporan	0.0022	165.000.000	12 Laporan	170.000.000,00	
2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota										
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	rasio ijin trayek	- Kota Depok, Cibodong, Jatimulya	26,5 km/jam	12 Laporan	0.0022	384.388.600	12 Laporan	180.000.000,00	
					Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Terminal									5.000.000.000,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									5.000.000.000,00	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									5.000.000.000,00	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									5.000.000.000,00	
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C							4.603.222.800		5.000.000.000,00	
2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal										
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	jumlah orang yang melalui terminal setiap tahun	- Kota Depok, Cibodong, Jatimulya	26,5 km/jam	1 Unit	5500000 orang	-	1 Unit	0,00	
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Rencana 2025	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
		Kecepatan rata-rata	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Dirhabilitasi dan Dipelihara	jumlah orang yang melalui terminal setiap tahun	- Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	25,5 km/jam	1 Unit	5500000 orang	4.603.222.800	1 Unit	5.000.000.000,00
			Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum								41.517.131.250,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								41.517.131.250,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								41.517.131.250,00
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								41.517.131.250,00
2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					33.439.704.000		
2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					33.439.704.000		Rp 41.517.131.250
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						
		Kecepatan rata-rata	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	persentase ketersediaan perlengkapan jalan	- Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	25,5 km/jam	700 Unit	3,88 %	31.339.704.000	700 Unit	39.417.131.250,00
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						
		Kecepatan rata-rata	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	persentase ketersediaan perlengkapan jalan	- Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	25,5 km/jam	5800 Unit	3,88 %	2.100.000.000	5800 Unit	2.100.000.000,00
			Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor								6.226.335.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								6.226.335.000,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								6.226.335.000,00
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								6.226.335.000,00
2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					1.724.845.000		
2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					1.724.845.000		Rp 6.226.335.000
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
		Kecepatan rata-rata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	- Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25,5 km/jam	5 Unit	85 %	299.999.500	5 Unit	4.000.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Rencana 2025	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	- Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26,5 km/jam	1 Dokumen	95 %	55.000.000	1 Dokumen	636.693.750,00	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	- Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26,5 km/jam	1 Unit	95 %	248.847.000	1 Unit	92.610.000,00	
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	- Kota Depok, Cilandong, Jatimulya	26,5 km/jam	12 Laporan	95 %	1.069.998.500	12 Laporan	1.447.031.250,00	
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	- Kota Depok, Cilandong, Jatimulya	26,5 km/jam	1 Laporan	95 %	50.000.000	1 Laporan	50.000.000,00	
					PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN								99.183.150		6.226.335.000,00
					Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian								99.183.150		Rp 4.000.000.000
					Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian										
					persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan pengelolaan perkeretaapian	persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan pengelolaan perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi	- Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	100%	1 dok	99.183.150	5 Unit	4.000.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Rencana 2025	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
								Rencana Induk Perkeretaapian						

BAB V PENUTUP

Bahwa tantangan penyelenggaraan perhubungan semakin bertambah sejalan dengan era globalisasi perdagangan dan harmonisasi pengaturan jasa transportasi. Untuk menjawab hal tersebut maka seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Depok harus dapat mewujudkan Visi dan Misi serta sasaran penyelenggaraan perhubungan.

Upaya untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran penyelenggaraan perhubungan dilakukan dengan meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas Perhubungan yang dibarengi dengan semangat kebersamaan seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Depok dalam melaksanakan program-program yang telah dicanangkan.

Untuk itu diperlukan suatu penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2024 untuk memberikan gambaran tentang rencana Kerja Dinas Perhubungan 1 (satu) tahun kedepan yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan baik dalam bidang pemerintahan maupun pembangunan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun program kerja yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah Kota Depok serta digunakan oleh seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Depok dalam menyelenggarakan jasa transportasi sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan untuk Mewujudkan **DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA**.

Namun demikian terlepas dari ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok, pelaksanaan program / kegiatan dan pencapaian visi misi Daerah tetap menjadi prioritas utama bagi Dinas Perhubungan Kota Depok. Dalam pelaksanaan kegiatan tentu akan menyesuaikan dengan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku demikian pula dengan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Depok yang senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat banyak pada umumnya dan pengguna jasa transportasi pada khususnya.

Sebagai catatan penting bahwa upaya Dinas Perhubungan Kota Depok dalam mengatasi semua permasalahan terkait tugas pokok dan fungsinya, maka sebagai rencana tindak lanjut akan tetap berkoordinasi dengan semua stake holder terkait dan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk dapat mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Depok.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA DEPOK**

Drs. ZAMROWI, M.Si
NIP. 1966 0607 1986 101 005